



**BERCERMIN MELALUI KORAN:  
REFLEKSI AKSIOLOGIS TERHADAP KEINDONESIAAN KITA**

**REFLECTING THROUGH NEWSPAPER:  
AXIOLOGICAL REFLECTION TO OUR INDONESIAN-NESS**

**Wahyu Wibowo  
Universitas Nasional  
kangbowie@gmail.com**

**ABSTRAK**

Koran, sejak awal keberadaannya di Indonesia pada awal abad ke-20, memang tidak pernah lepas dari fungsinya sebagai "pembela kepentingan rakyat", sehubungan dengan penegakan etos kemerdekaan bangsa dan kemudian penegakan etos persatuan-kesatuan bangsa. Oleh karena itu, lepas dari kenyataan bahwa koran adalah juga institusi komersial, koran dapat digunakan sebagai cerminan bagaimana kita memaknai demokrasi, demi pemantapan keindonesiaan kita, yang dalam tulisan ini akan difokuskan pada dua masa yaitu masa setelah Pemilu 2004 dan masa menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Melalui metode tindak tutur komunikasi, diperoleh fakta dari kedua masa tersebut bahwa upaya penegakan NKRI masih relevan dilakukan oleh koran, sepanjang manajemen koran tersebut memahami etika berbangsa dan bernegara.

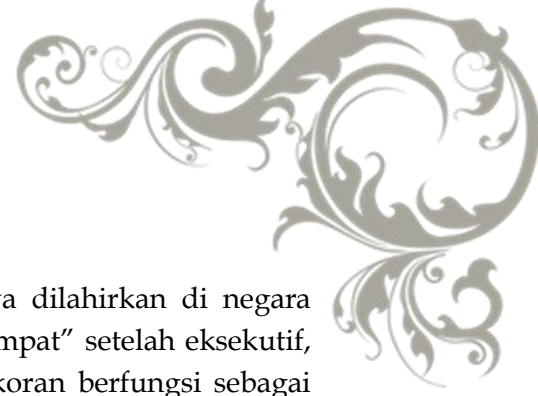
**Kata Kunci:** koran; demokrasi; tindak tutur komunikasi; pendidikan politik.

**ABSTRACT**

*The newspaper, since its existence in Indonesia at the beginning of the 20th century, has never been separated from its function as a "public interest defender", in connection with the enforcement of the nation's ethos of independence and the enforcement of the ethos of national unity. Therefore, despite from the fact that newspapers are also commercial institutions, newspapers can be used as a reflection of how we interpret democracy, for the sake of consolidation of our Indonesian-ness, which in this paper will be focused on two periods namely the period after the 2004 elections and the period leading up to elections 2018 and Election 2019. Through the method of speech acts communication, obtained the facts from both the period that the enforcement effort NKRI still relevant by the newspaper, as long as the management of the newspaper understand the ethics of nation and state.*

**Keywords:** newspaper; democracy; speech acts communication; political education.





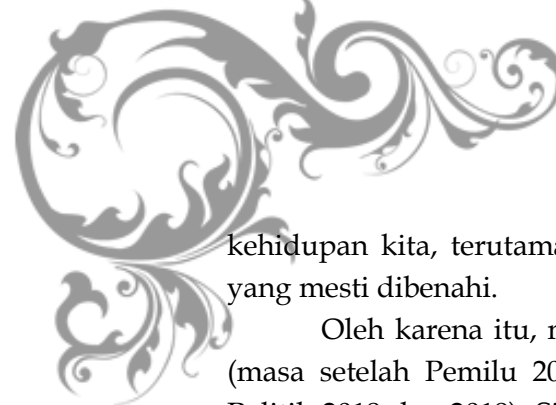
## PENDAHULUAN

Koran atau surat kabar, yang seturut sejarahnya dilahirkan di negara demokrasi, berposisi sebagai “lembaga negara yang keempat” setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seiring dengan posisinya itu, koran berfungsi sebagai “penjaga kebenaran”, karena menjembatani antara ketiga lembaga tersebut dengan kepentingan rakyat. Dengan demikian, benarliah jika ada yang berpendapat bahwa posisi dan fungsi koran dikatakan sebagai jembatan emas penegak kebenaran, karena apa pun yang diinformasikan pada ujungnya selalu demi kepentingan rakyat atau demi kesejahteraan rakyat.

Ungkapan “demi kepentingan rakyat”, yang berkelindan dengan peran koran itu sendiri sebagai wadah pendidikan politik rakyat, agaknya dapat dilihat melalui pemberitaan *Kompas* (“Kontestasi 2014 Bisa Terulang”, 12/4/2018; h.1). Pemberitaan ini mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan menerima penugasan dari partainya untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2019. Menurut *Kompas*, dalam kaitan dengan perannya sebagai wadah pendidikan politik bagi rakyat, penugasan Prabowo Subianto tersebut dinyatakan akan membuat kontestasi di Pemilu 2014 berpotensi terulang. Potensi ini, dari sudut perlokusi memang tidak dimunculkan secara tegas oleh pemberitaan *Kompas* tersebut. Kendati demikian, secara tersirat kita dapat menangkap amanat pemberitaan *Kompas* tersebut bahwa kontestasi itu bukan dalam rangka merobek-robek rasa kesatuan-persatuan bangsa, mengingat Partai Gerindra ‘hanya’ memiliki 73 kursi di DPR. Alhasil, Partai Gerindra masih membutuhkan tambahan 39 kursi dari partai lain. Bagaimana Partai Gerindra akan mencukupi kebutuhan kursinya, itulah amanat tersirat yang hendak disampaikan *Kompas* tersebut.

Pemilu 2014, yang mengantar Jokowi ke kursi kepresidenan, sebagaimana diketahui adalah wujud Pemilu yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Pasalnya, Pemilu 2014 merupakan lanjutan dari Pemilu 2004, yang membawa SBY ke kursi kepresidenan selama dua periode. Sebagaimana disebutkan oleh koran-koran ketika itu, Pemilu 2004 adalah fajar baru demokrasi Indonesia, mengingat pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat (Wibowo, 2009, 2018). Akan tetapi, fajar baru yang dikatakan mencuatkan keindonesiaan kita itu, dewasa ini mestilah kita sadari secara kritis mengingat “tsunami informasi” yang melanda kehidupan kita, dampak dari kedahsyatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Dampak ini, terutama ketika kita sekarang ini sedang berada dalam Tahun Politik 2018 (pilkada) dan 2019 (pilpres), berupa penyebaran ujaran kebencian dan informasi bohong (*hoax*), sebagaimana kita ketahui berkembang pesat belakangan ini melalui media sosial (medsos) yang pada titiknya berpeluang memecah rasa persatuan-kesatuan bangsa. Melalui ujaran kebencian dan *hoax*, diketahui dengan jelas kita kerap pula menjadi “pahlawan kesiangan” karena seolah-olah kita paling benar dan paling berani. Padahal, sementara itu, begitu banyak problem hidup dan





kehidupan kita, terutama dalam hal berbangsa dan bernegara belakangan ini, yang mesti dibenahi.


Oleh karena itu, marilah kita membuka koran *Kompas* edisi 15 Juni 2005 (masa setelah Pemilu 2004) dan edisi 12 April 2018 (masa menjelang Tahun Politik 2018 dan 2019). Simaklah, kita akan melihat cerminan “wajah kita” yang selalu saja carut-marut, sedih dan berduka, dan kerap kali bahkan sulit kita kenali lagi.

Metode riset yang digunakan adalah metode heuristik dan eklektik dengan menggarisbawahi Teori Tindak Tutur Komunikasi (*Speech Act Communication*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

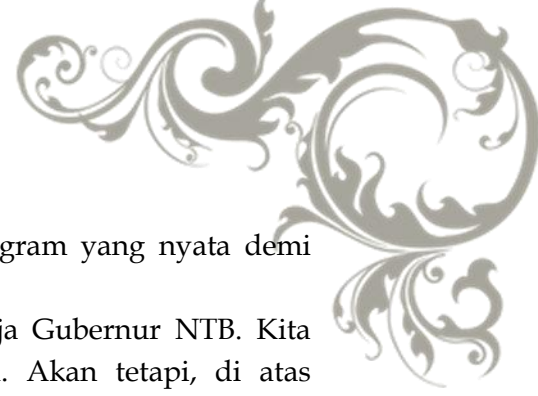
### Keindonesiaan Kita

Kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia, terutama sejak era Reformasi 1998, diwarnai oleh tiga bentuk “kejahatan”, yakni kekerasan, politik uang, dan korupsi. Ketiga bentuk ini memang lekat dengan praktik kekuasaan, sehingga sulit untuk tidak mengatakan bahwa ketiga bentuk tersebut adalah simbol keniscayaan.



Melalui pemberitaannya, *Kompas* (15/6/2005; h.1) menginformasikan bahwa calon penerus bangsa, yakni anak-anak berusia di bawah lima tahun di Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang kesulitan menatap masa depannya. Pasalnya, di sana sedang muncul “wabah” busung lapar, dan sebagaimana diberitakan *Kompas* tersebut wabah itu belum tertangani secara layak. Busung lapar, yang sejak puluhan tahun lalu merupakan simbol kemiskinan, dan oleh karena itu menjadi musuh negara nomor satu, tiba-tiba muncul kembali di depan mata kita tanpa pernah kita duga. Kemunculannya, seolah menepis predikat bahwa negara kita (yang sejak dahulu kala) dikenal sebagai negara yang *ijo royo-royo, gemah ripah loh jinawi*, yang oleh karena itu sedikit-banyak menyentak kesadaran kita bahwa Pemprov NTB lalai memperhatikan warganya. Dalam penegasan lain, Pemerintah Provinsi NTB ketika itu tidak melakukan tanggung jawab manajerialnya secara maksimal sebagai pengayom rakyat, yang dalam konteks ini merujuk pada upaya peningkatan kesejahteraan.

Betapa tanggung jawab tersebut benar-benar tidak dilakukan, dapat dilihat melalui amarah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu, ketika membesuk para korban busung lapar tersebut. SBY bahkan sampai berkata kepada Gubernur NTB, “Apa saja *sih* yang Saudara kerjakan, *kok* sampai-sampai ada busung lapar di wilayah Saudara?” Marah yang disemprotkan SBY ini memang beralasan, karena *Kompas* juga memberitakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB “hanya” melakukan rapat, rapat, dan rapat dalam mengatasi “wabah” busung lapar itu. Bahkan, rapat koordinasi bertajuk Operasi Sadar Gizi, di Mataram (Sabtu, 11/06/2005), yang dipimpin



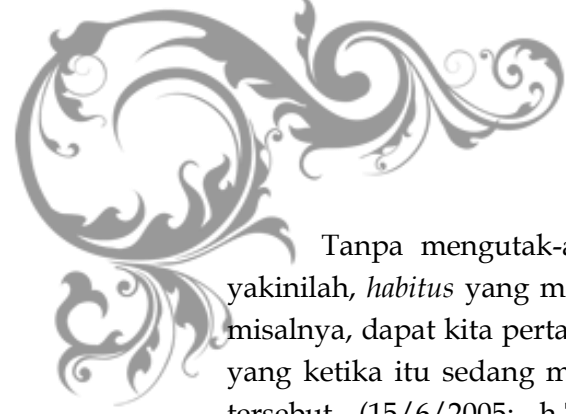
Gubernur NTB ketika itu, tidak juga mewujudkan program yang nyata demi mengatasi kasus busung lapar.

SBY memang sepatutnya marah terhadap kinerja Gubernur NTB. Kita pun, andai menjadi SBY, mungkin akan marah pula. Akan tetapi, di atas persoalan amarah itu, wabah busung lapar di NTB ketika itu oleh pemberitaan *Kompas* secara perlokutif digarisbawahi sebagai peristiwa kemanusiaan yang mestinya menggedor hati nurani dan solidaritas semua pihak, siapa pun itu, karena anak-anak balita itu adalah generasi muda harapan bangsa, generasi yang berpeluang memimpin negeri ini. Dengan demikian, benarlah amarah yang dilontarkan SBY kepada Gubernur NTB. Palsunya, yang dituntut terlebih dahulu memiliki hati nurani adalah Gubernur NTB, mengingat posisinya sebagai pengayom rakyat. Andai sang Gubernur memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, wabah busung lapar itu kecil kemungkinannya menyerang. Jadi, bukan begitu “wabah” menyerang, barulah kemudian aparat pemerintah provinsi tergopoh-gopoh merapatkannya atau mendiskusikannya untuk mengatasi. Alhasil, wajah kita, tepatnya keindonesiaan kita, menjadi dipertanyakan.

Perihal keindonesiaan kita, terutama yang berkaitan dengan ulah para pengayom rakyat, memang patut dipertanyakan terus-menerus. Cobalah simak kembali *Kompas* (15/6/2005; h.1). Bagaimana mungkin, instansi pemerintah yang mengurus ihwal keagamaan justru menjadi sarang korupsi? *Kompas* tersebut memberitakan, pihak Kepolisian telah memblokir sebuah rekening senilai Rp 684 miliar yang terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji periode 2001-2005 oleh Departemen Agama (Depag). Bayangkan, nilai-nilai macam apa yang dihayati para koruptor di Depag, ketika mereka melakukan tindak korupsi itu? Atau, hal ini mungkin dapat dijelaskan melalui konsep Pierre Bourdieu (Jenkins, 2004) mengenai *habitus*, yakni disposisi yang merupakan hasil internalisasi dari struktur lingkungan yang kemudian membentuk lingkungan dalam diri individu.

Dengan demikian, para koruptor di Depag kala itu terimbas *habitus* yang sulit mereka hindari. Alhasil, sekalipun bersekolah di pesantren atau di mancanegara, dan bahkan memperoleh nilai tinggi dalam ujian, ketika masuk ke lingkungan Depag mereka tetap tak berbeda dari “tikus-tikus” lainnya dalam menggerogoti uang negara, secara ganas, gila-gilaan, dan terstruktur. Yang membuat geram kita, bukankah kita tahu mereka sudah lama melakukan tindak tak terpuji itu, namun mengapa baru sekarang polisi turun tangan? Inilah keindonesiaan kita? Atau, apakah turun tangannya polisi setelah mendengar komitmen SBY bahwa membersihkan tikus haruslah dari rumah terlebih dahulu, baru ke rumah-rumah lainnya. Padahal, dari rumah siapa pun hendak dimulai, yang jelas SBY dan seluruh pengayom rakyat lainnya haruslah terlebih dahulu memperbaiki *habitus* mereka. Artinya, jangan hanya “tikus-tikus”-nya yang mereka basmi, sementara mental, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan orang-orangnya tak pernah mereka utak-atik.



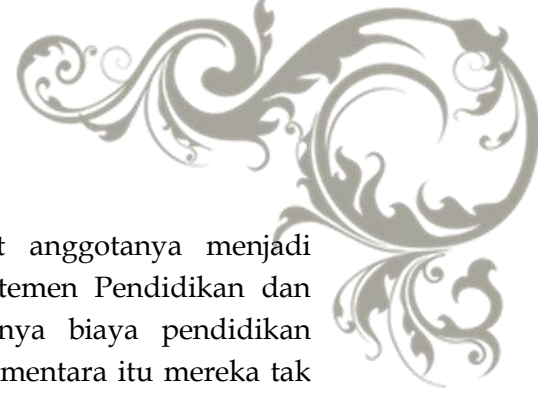


Tanpa mengutak-atik mental, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan itu, yakinilah, *habitus* yang memicu korupsi masih akan terus membayang. Hal ini, misalnya, dapat kita pertalikan dengan pesta pemilihan kepada daerah (pilkada) yang ketika itu sedang marak di daerah-daerah. Menurut pemberitaan *Kompas* tersebut (15/6/2005; h.7), kepala daerah yang baru terpilih berpotensi menghambat pemberantasan korupsi. Pasalnya, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pilkada akan memicu kepala-kepala daerah baru itu mencari sumber pendapatan lain di luar gaji resmi. Berdasarkan pemantauan di beberapa daerah, seperti di Lamongan, Pekalongan, Surabaya, Kutai Kartanegara, dan daerah lainnya, tiap-tiap pasangan calon harus mengeluarkan dana antara Rp 1,8 miliar hingga Rp 7 miliar untuk mengikuti pilkada. Dana ini digunakan untuk membiayai kampanye dan juga untuk diserahkan kepada partai yang menjadi kendaraan politik calon yang bersangkutan. Padahal, kala itu, gaji rata-rata bupati dan wali kota dalam satu tahun berkisar Rp 300 juta. Setelah berkuasa lima tahun, dana yang terkumpul hanya Rp 1,5 miliar, alhasil gaji yang diterima secara resmi lebih rendah ketimbang uang yang dikeluarkan untuk ikut pilkada. Dampaknya, amat dimungkinkan mereka ini akan tetap terkena *habitus* korupsi.



Dalam hubungan dengan hal di atas, barangkali kita masih bisa berharap banyak kepada para kepala daerah yang baru untuk senantiasa menjaga atau memagari nilai-nilai hukum normatif dengan nilai-nilai etis mereka. Akan tetapi, harapan ini masih akan menjadi harapan jika tidak ada niat yang kuat dari mereka sendiri. Pasalnya, pada Tahun Politik 2018 (Pilkada) dan 2019 (Pemilu), ternyata dapat dikatakan lebih dari separuh kepala daerah kita terlibat korupsi dengan pelbagai cara. Menurut *Kompas* (“Suap untuk Bayar Survei”, 12/4/2018; h.3), Bupati Bandung Barat, Abubakar, diduga meminta para kepala SKPD untuk mengumpulkan uang guna membiayai pencalonan istrinya, Elin Suharliah, dalam Pilkada 2018. Dalam halaman yang sama, *Kompas* juga memberitakan bahwa Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari telah meminta balas jasa 6,5-11% dari setiap proyek infrastruktur yang dijalankan oleh kontraktor di wilayahnya.

Di sisi politik uang dan korupsi, sebagaimana telah disinggung, wajah keindonesiaan kita atau kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga dilumuri oleh kejahatan. Dalam hubungan ini, kejahatan yang dimaksudkan adalah kejahatan simbolik yang dialami oleh para guru Indonesia yang menjadi anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Menurut pemberitaan *Kompas* (15/6/2005; h.9), anggota PGRI, yang ketika itu berjumlah 1,6 juta orang, sekitar 50%-nya belum memenuhi kualifikasi mengajar yang memadai. Bayangkan, di Tanah Air pada saat itu tersebar lebih dari 500 orang guru yang dikategorikan “tak pandai” mengajar, padahal mereka sehari-hari bekerja sebagai pengajar. Lalu, siapa yang salah? Apakah pihak PGRI yang selama ini berkesan sekadar organisasi politik? Sebab, kalau memang PGRI merupakan organisasi profesi,

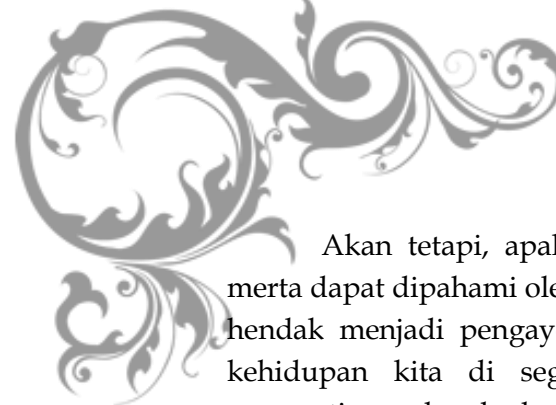


mengapa hingga kini tak pernah pandai membuat anggotanya menjadi profesional yang mumpuni. Ataukah ini salah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang selalu mengeluh mengenai kecilnya biaya pendidikan nasional yang mereka peroleh melalui APBN, namun sementara itu mereka tak pernah jera dalam mengeluarkan kebijakan mengenai kurikulum sekolah. Bayangkan, akan menjadi apa generasi muda kita kelak, terutama dalam hal memimpin negara, jika dididik oleh para guru yang belum memenuhi kualifikasi mengajar.

Kejahatan simbolik juga dialami generasi muda di Kupang, NTT. Dalam pemberitaan yang bersifat verdiktif, yaitu memutuskan sesuatu kenyataan secara moral, *Kompas* ("Pendidikan Penting untuk Mengelola NTT", 12/4/2018; h.21) memberitakan bahwa pendidikan penting untuk mengelola NTT. Pasalnya, SDM yang berkualitas tentu dapat mengelola sumber daya alam yang ada di NTT demi kesejahteraan masyarakat. Bahwa pendidikan itu niscaya, tentu tak perlu dipersoalkan lagi. Begitu pula, bahwa pendidikan itu penting, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa, tentu juga sesuatu yang tak perlu dipersoalkan. Akan tetapi, secara verdiktif *Kompas* justru menekankan betapa pentingnya pendidikan. Dari sudut kehidupan berbangsa dan bernegara, cara *Kompas* seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perlokusi yang mengandung dua tujuan: (1) demi mengingatkan Pusat betapa pentingnya pendidikan di NTT, yang berkorelasi dengan betapa pentingnya mencetak SDM-SDM yang berkualitas; dan (2) demi mengingatkan masyarakat bahwa Tahun Politik 2018 dan 2019 dapat menjadi bomerang bagi masyarakat NTT, mengingat masih kerap terjadinya politik uang.

Melihat hal-hal yang diberitakan *Kompas* edisi 2005 dan edisi 2018, menjadi benar bahwa wajah kita dalam berbangsa dan bernegara tidak/belum lepas dari rona layu dan bersedih. Untuk itu, boleh dipertanyakan, ada apa sebenarnya dengan keindonesiaan kita? Apakah nilai-nilai kita sudah meluntur? Nilai-nilai apa? Dalam konteks ini, benarlah Aristoteles (2004) tatkala menyinggung nilai-nilai etika. Ia mengatakan, di dalam etika kita harus memulainya dari pertimbangan nilai-nilai moral manusia secara aktual. Melalui pertimbangan ini, secara logis kita dituntut melakukan perbandingan, pertentangan, dan kemudian pengubahan, agar kita mampu mewujudkan suatu formula mengenai prinsip-prinsip yang umum. Menurut Aristoteles, prinsip-prinsip yang umum itu adalah *kebahagiaan hidup manusia*. Andai kebahagiaan itu merupakan tujuan hidup manusia, berarti kita juga harus melihat kegiatan khas manusia, atau *kegiatan keutamaan*, yakni kegiatan budi atau kegiatan yang sesuai dengan budi. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh Aristoteles dalam kegiatan keutamaan itu, *pertama*, kodrat umum sifat baik dan tindakan baik; *kedua*, keutamaan moral yang membimbing, keutamaan untuk mengikuti rencana budi, kemudian keutamaan intelek; dan, *ketiga*, hidup ideal sesuai dengan keutamaan itu, demi meraih kehidupan bahagia yang sejati.






Akan tetapi, apakah nilai-nilai moral keutamaan Aristoteles itu serta-merta dapat dipahami oleh mereka yang pada Tahun Politik 2018 dan 2019 *ngotot* hendak menjadi pengayom? Apalagi, dituntut oleh mondialisme, dewasa ini kehidupan kita di segala bidang cenderung didominasi oleh nilai-nilai pragmatisme dan hedonisme yang konsumtif. Oleh karena itu, cobalah kita “mengingat kembali” Pancasila kemudian kita cari nilai-nilai keutamaan yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, pertanyaannya, apakah nilai-nilai keutamaan Pancasila dapat “menyaingi” atau “mengungguli” nilai-nilai pragmatisme dan hedonisme yang konsumtif itu?

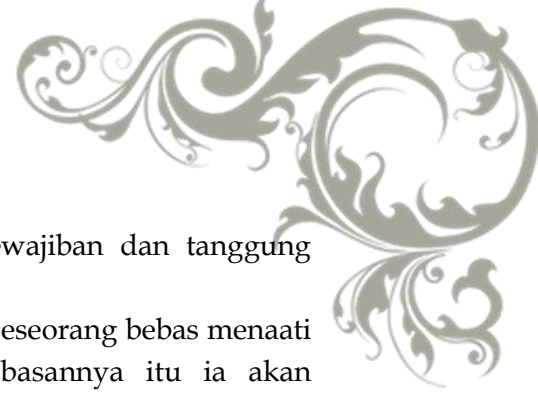
### **Penyeragaman-manipulatif: Sense pada Pancasila**

Berpijak dari pertanyaan di atas, agaknya kita perlu memahami bahwa sekalipun nilai-nilai keutamaan Pancasila sudah mendarah-daging di dalam diri kita, namun, sementara itu, kita juga menyadari bahwa hidup dan kehidupan kita belakangan ini sering kali terbelenggu oleh *homogenitas* akibat penetrasi nilai-nilai mondialisme, yang sejatinya sering kali bertentangan dengan nilai-nilai keutamaan Pancasila itu sendiri.



Alhasil, dengan homogenitas itu kita menganggap kita boleh *berbicara sebebaskan-bebasnya*, boleh *mengkritik semau-maunya*, dan boleh *bertindak sekehendak hati* (sebagaimana dilakukan orang di mana pun alias homogenitas), sehingga dalam istilah umum kita sudah *kebablasan*. Oleh karena itu, dalam kaitan ini, patut pula dikemukakan bahwa cara kita berbangsa dan bernegara, atau cara kita berdemokrasi, belakangan ini berkesan *hanya* berputar-putar di sekitar norma-norma hukum belaka, tanpa *mau tahu* adanya dasar-dasar moral yang mesti dipatuhi. Itulah sebabnya, mengapa kita tega membiarkan anak-anak kita terserang busung lapar, misalnya, padahal kita adalah pengayom rakyat, bukti betapa rapuhnya kita terhadap dasar-dasar moral. Begitu pula, mengapa kita amat gemar pada pragmatisme dan hedonisme yang konsumtif, sehingga menelantarkan nasib guru, contoh lain, setidaknya menyuratkan bahwa kita sebenarnya tidak memiliki dasar-dasar moral yang kuat. Atau, contoh lain, memasabodohkan generasi muda kita, terutama dari pendidikan, juga membuktikan bahwa kita telah mengabaikan nilai-nilai moral keutamaan Pancasila. Dengan demikian, belakangan ini hidup kita memang mirip “rusa masuk kampung”: bingung sambil berlari ke sana kemari tidak jelas.

Memahami mengapa dasar-dasar moral *mesti dipatuhi* dalam berbangsa dan bernegara, setidaknya dapat kita pertalikan pada *nilai-nilai kebebasan manusia*. Pasalnya, moralitas (dan juga etika), yang pada dasarnya berkelindan dengan sejumlah peraturan, memang dilandaskan pada nilai-nilai kebebasan manusia. Atau, menurut Magnis-Suseno (1987), adanya sejumlah peraturan hanya masuk akal justru karena manusia memiliki nilai-nilai kebebasan. Nilai-nilai kebebasan manusia itu sendiri bersangkutan erat dengan suara hatinya. Artinya, dalam kebebasannya seseorang pasti dipandu oleh suara hatinya,



sehingga ia akan mampu menyeimbangkan antara kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap apa pun yang dilakukan.

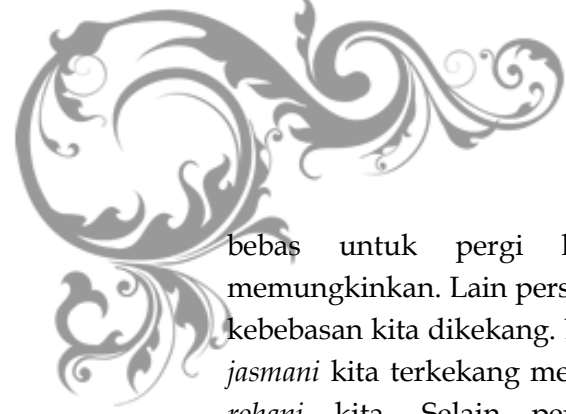
Dalam penegasan lain, menurut Magnis-Suseno, seseorang bebas menaati suara hatinya atau tidak. Akan tetapi, dalam kebebasannya itu ia akan menyadari bahwa dirinya, hanya dirinya, yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Implikasinya, hanya karena seseorang memiliki kebebasan, ia dapat dibebani kewajiban moral. Dalam konteks ini, kita pun dituntut mampu membedakan antara *kebebasan eksistensial* dan *kebebasan sosial*. Kebebasan eksistensial adalah cerminan kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Sifatnya positif dan memperlihatkan kesanggupan individu dalam menentukan tindakannya sendiri. Bahkan, terhadap nalurinya sendiri, manusia dapat mengambil sikapnya sendiri. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa selain mampu untuk menentukan sikap dan tindakan sendiri, kebebasan manusia biasanya lebih dihayati dalam hubungannya dengan orang lain. Akan tetapi, karena kebebasan merupakan eksistensi kita, acap kali kita tidak menyadari bahwa kita memilikinya.

Selain hal di atas, penting pula kita pahami bahwa kebebasan jasmani bersumber pada kebebasan rohani. Kebebasan rohani adalah kemampuan kita untuk menentukan sendiri apa yang kita pikirkan, untuk menghendaki sesuatu, untuk bertindak secara terencana. Kebebasan rohani, yang bersumber dari akal budi, sementara itu, seluas jangkauan pikiran dan bayangan manusia. Oleh karena itu, kebebasan rohani tak mungkin dilanggar oleh orang lain. Artinya, orang *tidak dapat dipaksa* untuk memikirkan atau menghendaki sesuatu; atau, dalam kaitannya dengan kasus busung lapar, seseorang tidak mungkin dipaksa untuk hidup menderita kemiskinan, sekalipun ia hidup menderita sampai-sampai anaknya terkena busung lapar – sebagaimana halnya tidak mungkin kita dipaksa untuk mencintai seseorang atau memercayai sesuatu. Atau, dalam ungkapan Magnis-Suseno, batin kita adalah kerajaan kita. Kita, barangkali, dapat ditekan, dibujuk, atau diancam agar melakukan sesuatu, namun apa pun yang kita pikirkan sebenarnya tidak seorang pun tahu. Atau, dalam pertaliannya dengan kasus para guru yang kesejahteraannya telantar, mereka mungkin dapat ditekan dan diancam untuk tetap mengajar, agar sekolahnya selalu menadapat pujian sebagai sekolah yang berkomitmen tinggi terhadap pendidikan anak-anak, tetapi apa pun yang mereka pikirkan tidak seorang pun yang tahu.

Perihal kebebasan sosial adalah kebebasan yang kita terima dari orang lain. Hakikatnya terletak dalam ungkapan bahwa manusia itu bebas apabila kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak tidak dibatasi oleh orang lain. Namun demikian, kemungkinan untuk menentukan diri sendiri (kebebasan eksistensial) terbatas justru oleh kekuatan alam. Karena banjir, misalnya, sesungguhnya kita tetap bebas untuk pergi ke mana-mana, tetapi kenyataannya kita tetap tidak bisa bebas ke mana-mana, karena dibatasi kekuatan alam tersebut. Atau, kalau kita *terkunci* di dalam gudang, berarti sebenarnya kita tetap





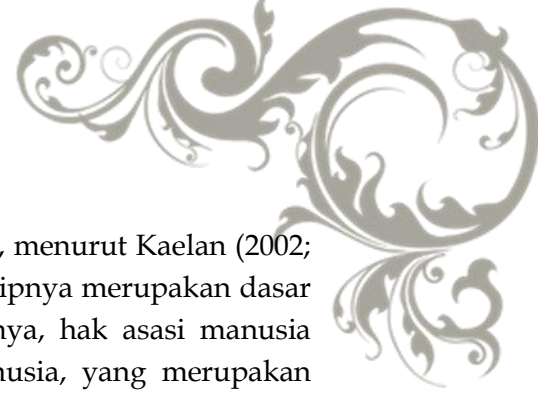


bebas untuk pergi ke mana-mana, meskipun kenyataannya tidak memungkinkan. Lain persoalan jika kita *sengaja dikunci* di dalam gudang: berarti, kebebasan kita dikekang. Dalam konteks ini, berarti persoalannya adalah apakah *jasmani* kita terkekang melalui paksaan fisik, sehingga memengaruhi kebebasan *rohani* kita. Selain perihal kebebasan jasmani, kebebasan sosial juga berdampingan rapat dengan *kebebasan normatif*, misalnya dengan perintah dan larangan. Ibu guru, kepala kantor, atau presiden, misalnya, melalui perintah dan larangannya yang berbentuk peraturan atau UU menuntut kewajiban pada individu-individu untuk mematuhi. Implikasinya, bebas dalam arti jasmani berarti kita *dapat* atau *sanggup* melakukan sesuatu (dalam hal ini: mematuhi peraturan atau UU). Sementara itu, bebas dalam arti normatif tidak bertalian dengan kesanggupan individu, melainkan berhubungan dengan *boleh-tidaknya* individu melakukan sesuatu (sekalipun ia *dapat* bebas melakukannya). Implikasinya, kebebasan eksistensial individu menjadi tertantang. Dalam pertaliannya dengan korupsi yang belakangan ini dituduhkan sedang marak dilakukan oleh para kepala daerah, meskipun mereka dilarang korupsi, bukankah mereka akan tetap *dapat* melakukan korupsi. Jadi, apakah korupsi itu dilakukan atau tidak, tetap tergantung individu kepala daerah itu. Merekalah yang menentukannya sendiri. Mereka bebas, ingin melakukan kejahatan, politik uang, atautkah korupsi (bdk.: Magnis-Suseno, 1987).



Berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka manusia dan kebebasannya itu tak mungkin diceraikan dari masalah sifat kodrat manusia sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial, yang secara hakiki mencerminkan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di negara liberal, misalnya, yang mendasarkan bentuk negaranya pada sifat kodrat manusia sebagai individu, otomatis akan lebih mengutamakan nilai-nilai individualisme. Oleh karena itu, kebebasan manusia dalam individualisme adalah kebebasan perseorangan yang tak berkait dengan orang lain. Alhasil, aspek individual lebih menonjol ketimbang aspek sosial. Demikian pula, di negara sekuler, yang mendasarkan bentuk negaranya pada nilai-nilai sekulerisme, pemisahan antara negara dan agama dilakukan secara amat tegas. Negara, menurut sekulerisme, adalah urusan dunia. Sementara itu, agama adalah urusan akhirat. Hal ini tentu berbeda dari NKRI yang memberangkatkan diri dari prinsip keseimbangan antara manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Prinsip ini, bertolak dari filosofi bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam “wujud” monopluralitas (majemuk tunggal), yakni sebagai makhluk jasmani-rohani, makhluk pribadi, makhluk individu, dan juga sekaligus sebagai makhluk sosial.

Dengan demikian, dalam hal hakikat negara, tujuan negara, atau tugas-tugas pemerintahan, masalah manusia diletakkan secara sentral, karena negara adalah lembaga kemasyarakatan yang terdiri atas manusia, disusun oleh manusia, dan bertujuan memelihara kepentingan dan kebutuhan manusia demi

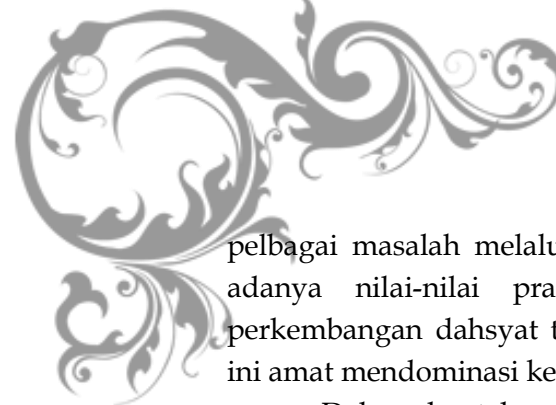


mensejahterakan warganya. Atau, dalam penekanan lain, menurut Kaelan (2002; bdk. Wreksosuhardjo, 2004), hakikat manusia pada prinsipnya merupakan dasar ontologis segala hak asasi. Selaras dengan pengertiannya, hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada kodrat manusia, yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga bukan pemberian penguasa atau negara. Dalam konteks ini, dapat dipertegas bahwa negara kita tidak bersifat individualis (liberal) atau sekuler (keduniawian), tetapi negara Pancasila, yakni negara hukum yang berkewajiban memelihara ketertiban, keamanan dan persamaan, serta kesejahteraan (periksa: Pembukaan UUD 1945 alinea IV). Oleh karena itu, seluruh bangsa Indonesia, terutama para pemimpin pemerintahan, tidak mungkin bisa melepaskan diri dari nilai-nilai ini.

Kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial merupakan sifat dasar dari totalitas manusia di dalam negara. Di dalam negara, terdapat sejumlah objek yang senantiasa berkorelasi antara satu dan lainnya. Namun demikian, perlu dicatat bahwa korelasi yang memacu ke arah terbentuknya kebersamaan yang bersifat total hanya korelasi yang ekuivalen. Korelasi ekuivalen inilah yang dicerminkan dari kesatuan dan persatuan Indonesia, yang secara kultural sudah dihayati nenek moyang kita melalui nilai-nilai luhur di balik ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika*. Kemudian, mengingat negara adalah produk dari masyarakat, maka negara Pancasila adalah juga produk dari masyarakat. Dalam pengertian ini, sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai filosofi dan ideologi negara, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia, yang berupa pandangan hidup, yakni nilai-nilai adat-istiadat dan kebudayaan serta sebagai kausa materialis Pancasila. Dengan demikian, Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Tatkala bangsa Indonesia mendirikan negara, dan tatkala para pendiri negara mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, maka bangsa Indonesia memiliki cita-cita, gagasan-gagasan, dan ide-ide. Dengan demikian, berarti Pancasila juga berposisi sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan. Dilihat dari perspektif ini, Pancasila terkategori ke dalam sistem ideologi terbuka. Artinya, ideologi Pancasila tidak bersifat kaku, tetapi aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hanya, yang patut digarisbawahi, keterbukaan ini tidak berarti kita dapat mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, kecuali mengeksplisitkan wawasannya secara kongkret, sehingga mampu memecahkan masalah-masalah baru yang aktual secara lebih tajam. Mengeksplisitkan berarti menyadari bahwa di dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, yang karenanya tidak langsung dapat dioperasionalkan. Dengan demikian, eksplisitasi itu dilakukan dengan menghadapkan Pancasila pada





pelbagai masalah melalui refleksi yang rasional dan kritis, misalnya masalah adanya nilai-nilai pragmatis dan hedonisme yang konsumtif, akibat perkembangan dahsyat teknologi komunikasi dan informasi, yang belakangan ini amat mendominasi kehidupan kita melalui bentuk ujaran kebencian dan *hoax*,

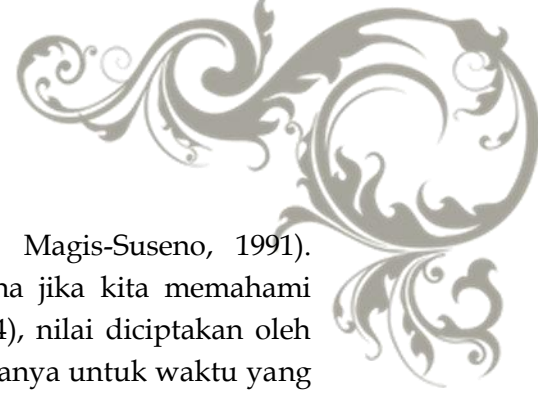
Dalam konteks dengan tulisan ini, sebagai ideologi terbuka apakah berarti Pancasila dapat dijadikan simbol perlawanan terhadap nilai-nilai *kebebasan* yang tanpa batas, yang belakangan ini kerap dipertunjukkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat? Pancasila memang harus dijadikan simbol perlawanan terhadap nilai-nilai *kebebasan* yang tanpa batas itu. Juga, nilai-nilai asing mana pun yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pasalnya, tanpa perlawanan, kita akan terjat ke dalam dunia *penyeragaman-manipulatif* atau *homogenitas*, yang berpeluang membuat hidup kita menjadi “sewarna”, “seragam”, atau “homogen”. Dikatakan penyeragaman-manipulatif, karena kita *seakan-akan* tidak kuasa berbeda dari orang lain, alias harus seragam dengan orang lain, terutama dalam hal gaya hidup. Contohnya, belakangan ini kita tidak bebas memilih informasi yang kita sukai, karena media massa kita (terutama TV) menyeragamkan secara manipulatif tayangan-tayangan mereka. Andai ada kisah mengenai dunia hantu, misalnya, semua TV kita mengisahnkannya secara bersamaan. Andai ada cerita mengenai perselingkungan artis, TV kita juga sama-sama mengisahnkannya. Andai ada iklan mobil, rumah mewah, baju bagus, *hand phone* terbaru, atau makanan enak, TV kita pun bersama-sama mengangkatnya, agar kita tergiur ingin memilikinya. Begitu pula, andai ada peristiwa mengenai busung lapar, penyelewengan yang dilakukan panitia pilkada, atau peristiwa presiden menjawab kritik dari seorang tokoh masyarakat, TV kita mem-*blow up*-nya dengan semangat yang seragam: besar-besaran, berlebihan, alias *lebay*. Hal ini, dewasa ini, belum lagi ditambah dengan kiprah medsos kita yang menggemari ujaran kebencian dan *hoax*. Seakan-akan hanya saling lempar-kritik itulah wajah keindonesiaan kita. Padahal, rakyat muak melihatnya.



### Demokrasi yang Damai

*Kompas* (“Demokrasi Damai Wujud Pancasila”, 12/4/2018; h.4), menegaskan bahwa pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat diharapkan mampu menyuburkan nilai-nilai demokrasi yang damai di Indonesia.

Penegasan yang diungkapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu dilakukan terkait dengan penyebaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, terutama dalam Tahun Politik 2018 dan 2019. Upaya BPIP ini patutlah diapresiasi. Akan tetapi, untuk menemukan kembali wajah keindonesiaan kita, alias tidak hanya sekadar menyebarkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, setidaknya dapat kita lakukan melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila, yang dalam kaitan ini akan ditafsirkan melalui



tujuh prinsip etika kemasyarakatan universal (lihat: Magis-Suseno, 1991). Revitalisasi ini bukanlah sesuatu yang istimewa, karena jika kita memahami pendapat Nietzsche (Fronzizi, 2001; bdk.: Wahana, 2004), nilai diciptakan oleh manusia. Alhasil, nilai menjadi stabil dan berpengaruh hanya untuk waktu yang sementara.

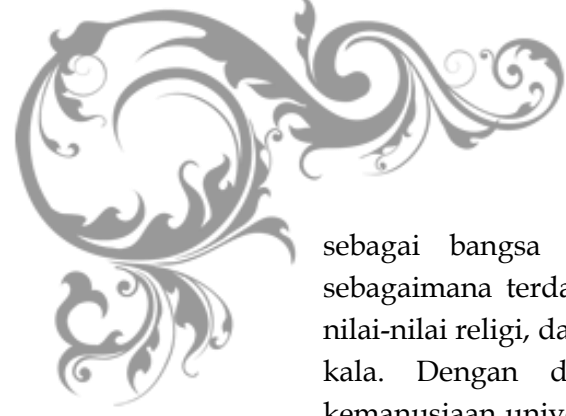
Berbeda dari Nietzsche, penulis beranggapan bahwa tidak berarti nilai-nilai moral keutamaan Pancasila tidak stabil dan hanya bersifat sementara. Nilai-nilai ini hanya sedang mengalami “gangguan”, atau sedang “tiarap”, akibat penetrasi mondialisme, terutama akibat dominasi nilai-nilai pragmatis dan hedonisme yang konsumtif, di tengah perkembangan dahsyat teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itulah, revitalisasi nilai-nilai Pancasila memang bukan sesuatu yang istimewa, melainkan sesuatu yang harus dilakukan, karena akan menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara kita dari susupan nilai-nilai asing yang mondial itu. Apalagi, sejak era Reformasi, kita selalu mendengar istilah-istilah *keterbukaan*, *kebebasan*, dan *demokrasi*, yang, mungkin, tidak kita pahami maknanya.

Mengingat *keterbukaan*, *kebebasan*, dan *demokrasi* mengandaikan “tanggung jawab”, maka upaya revitalisasi terhadap nilai-nilai moral keutamaan Pancasila pertama-tama mesti dilihat dari perspektif pendidikan Pancasila. Selama ini, pendidikan Pancasila memang sering kali dilirik hanya dengan sebelah mata. Padahal, pendidikan Pancasila bukanlah persoalan sepele; bukan pula persoalan yang hanya menyangkut materi normatif ideologis untuk kepentingan bangku sekolah atau bangku kuliah. Pendidikan Pancasila adalah proses panjang dan seumur hidup yang harus dilalui bangsa Indonesia dalam hal memaknai nilai-nilai filosofis Pancasila. Oleh karena itu, melalui pendidikan Pancasila yang terus-menerus itu, kita dapat menghirup dan kemudian menghayati “tanggung jawab” kita sebagai manusia Indonesia dalam kaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Pасalnya, bukankah kita juga bergaul secara mondial dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Berikut ini adalah uraian kritis mengenai ketujuh prinsip etika kemasyarakatan universal tersebut, yang secara heuristik dipertalikan dengan upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

1. Tiap bangsa dan negara berhak atas integritas nasionalnya sendiri dan wajib untuk menghormati integritas tiap bangsa dan negara lain dalam kesetiakawanan serta rasa tanggung jawab terhadap semua bangsa di dunia. Prinsip pertama ini, menurut Magnis-Suseno, dapat disebut pula sebagai prinsip nasionalisme yang bertanggung jawab. Nasionalisme yang bertanggung jawab tidak hanya memandang kepentingan bangsanya sendiri, tetapi juga menempatkan diri dalam ikatan tanggung dengan semua bangsa di dunia. Dalam konteks dengan nilai-nilai Pancasila, menurut penulis, jelas bagi kita bahwa sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia,

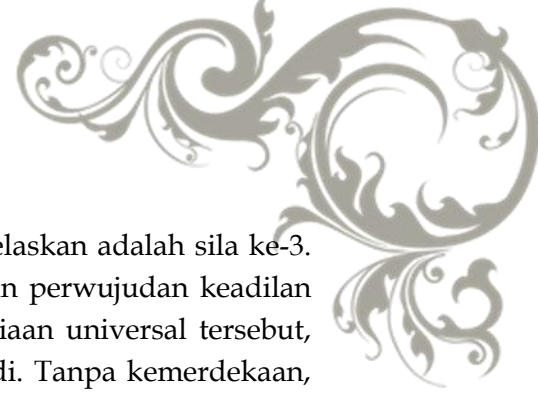




sebagai bangsa yang nasionalismenya amat bertanggung jawab, sebagaimana terdapat di dalam nilai-nilai adat, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai religi, dan nilai-nilai kenegaraan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dengan demikian, bangsa Indonesia juga memiliki sifat kemanusiaan universal, yang bertumpu pada prinsip berketuhanan yang mahaesa, berpersatuan Indonesia, bermusyawaratan/berperwakilan, dan berkeadilan sosial;

2. Hak-hak dasar tiap orang sebagai manusia wajib dihormati. Prinsip etis kedua ini, menurut Magnis-Suseno, berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia. Artinya, tidak mungkin membangun masyarakat yang sungguh-sungguh manusiawi, kecuali keutuhan tiap-tiap anggotanya dihormati. Menurut penulis, sila ke-5 Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" jelas-jelas mencerminkan bahwa bangsa Indonesia amat menghormati hak-hak dasar tiap orang sebagai manusia. Cerminan ini, yang membuat bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kemanusiaan universal, tampak pada penggarisbawahan keadilan sosial (terutama) dalam hal penyelenggaraan negara. Dalam praktiknya, penyelenggaraan negara kita memperhatikan dengan saksama pemeliharaan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus para warga perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan tiap golongan warga negara;
3. Semua anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang menyangkut mereka sendiri. Prinsip etis ketiga ini, menurut Magnis-Suseno, adalah prinsip demokrasi. Dalam kaitan ini, hemat penulis, sila ke-4 Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan", mencerminkan bangsa Indonesia yang demokratis, yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Berdasarkan pertalian erat di antara kelima sila dalam Pancasila, maka sila ke-4 tersebut juga bersifat berketuhanan yang mahaesa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Perwujudan keadilan sosial perlu diberi prioritas utama dalam usaha pembangunan masyarakat. Prinsip etis keempat ini, menurut Magnis-Suseno, adalah prinsip yang sederhana, yakni kemanusiaan sebuah masyarakat dapatlah diukur dari perhatiannya kepada anggota-anggotanya yang paling lemah, miskin, dan menderita. Hal ini, hemat penulis, selain berkaitan dengan sila ke-5 Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", sila ke-4 Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", juga bertalian dengan sila ke-3 Pancasila, "Persatuan Indonesia". Dari ketiga sila ini, yang membuat bangsa Indonesia memiliki

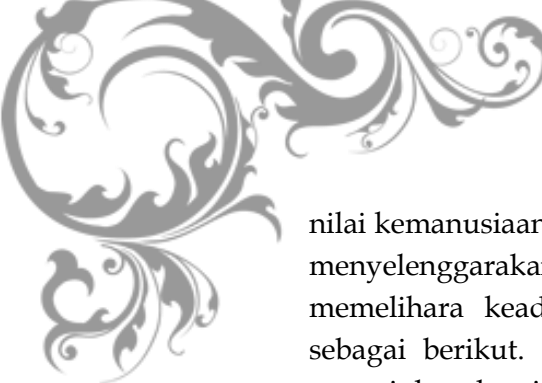




nilai-nilai kemanusiaan universal, yang perlu dijelaskan adalah sila ke-3. Persatuan Indonesia, dalam hubungannya dengan perwujudan keadilan sosial dan demi mencuatkan nilai-nilai kemanusiaan universal tersebut, merujuk pada kemerdekaan Indonesia yang abadi. Tanpa kemerdekaan, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lain di dunia, tidak akan pernah mewujudkan keadilan sosial dalam hal pembangunan masyarakat. Mengingat hubungan erat di antara sila-sila Pancasila, maka persatuan Indonesia didasari pula oleh ketuhanan yang mahaesa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, pada dasarnya, juga menjiwai kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia;

5. Harkat keyakinan agama sendiri membenarkan diri dalam sikap hormat terhadap keyakinan hati orang lain. Prinsip etis kelima ini, menurut Magnis-Suseno, tidak mengandaikan matinya agama di dalam budaya modern. Hal ini, menurut penulis, ternyata dapat kita lihat pada sila ke-1 Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Hubungan negara dengan Tuhan tentunya tidak bersifat langsung, karena negara hanya mempunyai hubungan sebab-akibat langsung dengan manusia, sedangkan manusialah yang mempunyai hubungan sebab-akibat yang langsung dengan Tuhan;
6. Konflik-konflik pribadi, sosial, nasional, dan internasional harus dipecahkan secara damai, dengan menolak penggunaan kekerasan. Prinsip etis keenam ini, menurut Magnis-Suseno, adalah prinsip penolakan kekerasan. Hal ini, hemat penulis, bertalian dengan sila ke-3 Pancasila, "Persatuan Indonesia". Sila ke-3 ini, selain menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kemanusiaan universal, karena bangsa yang cinta damai, juga menegaskan kepada kita bahwa NKRI berupaya keras mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat. Negara tidak memihak pada salah satu golongan; negara bekerja demi kepentingan seluruh rakyat; negara tidak boleh menjadi totalitarisme. Oleh karena itu, bangsa kita mengutuk segala macam bentuk kekerasan;
7. Segala pembangunan harus dijalankan dalam tanggung jawab terhadap keutuhan lingkungan hidup dalam solidaritas dengan generasi umat manusia yang akan datang. Prinsip etis ketujuh ini, menurut Magnis-Suseno, merupakan prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan. Hemat penulis, prinsip ini berkaitan dengan sila ke-5 Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Sebagai bangsa yang menghayati nilai-






nilai kemanusiaan universal, dan sebagai bangsa yang melaksanakan dan menyelenggarakan negara, bangsa Indonesia bertanggung jawab dalam memelihara keadilan sosial, yang jika dirinci, di antaranya, adalah sebagai berikut. *Pertama*, memelihara kepentingan umum; dan *kedua*, memajukan kesejahteraan dan lingkungan kehidupan yang tinggi bagi tiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, tiap keluarga, tiap warga negara perseorangan. Pelaksanaan pemeliharaannya dilakukan baik oleh negara maupun oleh perseorangan sendiri, baik tidak dengan bantuan negara maupun dengan bantuan negara.

Memperhatikan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui ketujuh prinsip etis kemasyarakatan atau nilai-nilai kemanusiaan universal di atas, setidaknya kita akan melihat wajah keindonesiaan kita dewasa ini yang lebih segar. Dengan demikian, sebagai manusia dan bangsa yang dewasa ini hidup di tengah pergaulan mondial, kita benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang bermartabat Indonesia.

## SIMPULAN

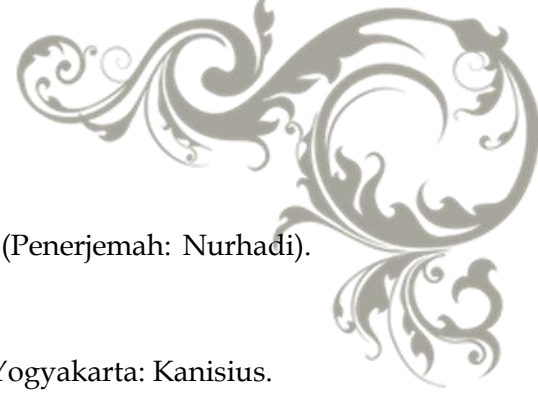


Wajah keindonesiaan kita, yang tercermin dari koran *Kompas* edisi 15 Juni 2005 dan edisi 12 April 2018, memperlihatkan wajah yang carut-marut, layu, dan seolah-olah kehilangan nilai-nilai aksiologis, terutama dalam hal berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, agar wajah keindonesiaan kita belakangan ini tampak segar, terutama bertalian dengan Tahun Politik 2018 (Pilkada) dan 2019 (Pemilu), kita tidak sekadar membutuhkan penyebaran sosialisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru lebih membutuhkan revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi ini, secara heuristik-aksiologis dianggap cocok jika diberangkatkan dari pendapat Magnis-Suseno (1991) mengenai tujuh prinsip etika kemasyarakatan.

Ketujuh prinsip tersebut, setidaknya akan menyentak kesadaran dialektis kita terhadap prinsip-prinsip etis kita selama ini, terutama dalam hal berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini pula, akan menunjukkan wajah keindonesiaan kita, yang dilumuri nilai-nilai Pancasila itu, adalah bagian inheren dari “wajah” kehidupan mondial dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. 2004. *Aristoteles*. Yogyakarta: Program S-3 Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 1991. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia.
- Fronzizi, Risieri. 2001. *Pengantar Filsafat Nilai*. (Penerjemah: Cuk Ananta Wijaya). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. (Penerjemah: Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Wahana, Paulus. 2004. *Nilai, Etika Aksiologis Max Scheler*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo, Wahyu. 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika*. Jakarta: Penerbit Kompas
- , Wahyu. 2018. *Komunikasi Kontekstual*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wreksosuhardjo, Sunarjo. 2004. *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*. Yogyakarta: Andi

#### TENTANG PENULIS

**Wahyu Wibowo** adalah lulusan Program S-3 Ilmu Filsafat dari Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, dengan disertasi tentang “sejatinya” etika pers Indonesia. Selain telah menulis 33 judul buku, menerima Sertifikat Wartawan Utama dari Dewan Pers (2011), giat sebagai narasumber pada kegiatan Klinik Penulisan Artikel Ilmiah tingkat Nasional, yang dikoordinasikan oleh Kemenristekdikti RI (sejak 2006), ia juga aktif mengajar mata kuliah Filsafat Bahasa, Dasar-dasar Filsafat dan Logika, Kemahiran Menulis, dan Penulisan Kreatif di Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakarta.

